

RINGKASAN

Revly Zarwa Harahap

NIM 210510090

**PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM
PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA NON-PROSEDURAL
(Studi Penelitian Pada Kantor Imigrasi Kelas II
TPI Kota Lhokseumawe)**

**(Dr. Malahayati, S.H., LL. M. dan Dr. Yusrizal,
S.H., M.H)**

Imigrasi merupakan institusi yang berwenang mengatur lalu lintas orang antarnegara dan memiliki peran strategis dalam pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Keimigrasian, terdapat empat fungsi utama imigrasi yang berkaitan dengan keberangkatan PMI, yaitu: (1) pelayanan keimigrasian melalui penerbitan paspor; (2) penegakan hukum untuk memastikan WNI menaati ketentuan keberangkatan; (3) keamanan negara untuk mencegah ancaman kriminalitas internasional; dan (4) fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat agar calon PMI mengikuti prosedur sah. Di Aceh, wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe menjadi daerah dengan aduan tertinggi terkait PMI non-prosedural di luar negeri. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan peran Kantor Imigrasi Lhokseumawe dalam pencegahan PMI non-prosedural, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe dengan tiga responden dari instansi tersebut dan satu informan yaitu Kepala Desa Meunasah Baro sebagai desa binaan imigrasi. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Lhokseumawe telah melakukan berbagai tindakan pencegahan berdasarkan fungsi keimigrasian, seperti bimbingan teknis wawancara pemohon, koordinasi dengan lembaga terkait, sosialisasi melalui media, serta pembentukan desa binaan imigrasi. Namun, jumlah PMI non-prosedural masih sulit ditekan. Hambatan yang dihadapi meliputi beban kerja tinggi, luasnya wilayah kerja, rendahnya kesadaran masyarakat, dan modus operandi yang semakin canggih.

Disarankan kepada Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk memperluas inovasi dalam pencegahan PMI non-prosedural, distribusi tugas secara merata serta memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait khususnya BP2MI sebagai lembaga yang berwenang melindungi PMI secara langsung. Kemudian, disarankan kepada Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk meningkatkan pelayanan, dan pengawasan keimigrasian serta meningkatkan intensitas sosialisasi dan mempertegas tugas dan fungsi desa binaan guna memastikan peran pencegahan berjalan dengan baik.

**Kata Kunci: Peran Imigrasi, Pencegahan, Pekerja Migran Indonesia, Non-
-Prosedural**

SUMMARY

Revly Zarwa Harahap
NIM 210510090

THE ROLE OF IMMIGRATION OFFICES IN PREVENTING NON-PROCEDURAL INDONESIAN MIGRANT WORKERS (A Research Study At The Class II TPI Immigration Office In Lhokseumawe City)

**(Dr. Malahayati, S.H., LL. M. and Dr. Yusrizal, S.H.,
M.H)**

Immigration is an institution authorized to regulate the movement of people across countries and plays a strategic role in preventing the departure of non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI). According to Article 1 paragraph (3) of the Immigration Law, there are four main immigration functions related to PMI departures: (1) immigration services through passport issuance; (2) law enforcement to ensure citizens comply with departure regulations; (3) state security to prevent international crime; and (4) facilitation of community welfare development to ensure prospective PMIs follow legal procedures. In Aceh, the Class II Immigration Office TPI Lhokseumawe has the highest number of complaints concerning non-procedural PMIs abroad. This study aims to examine the role of the Lhokseumawe Immigration Office in preventing non-procedural PMIs, the obstacles encountered, and the efforts made to overcome them.

The research applies a qualitative method with an empirical juridical and descriptive approach. The study was conducted at the Class II Immigration Office TPI Lhokseumawe, involving three respondents from the institution and one informant, the Head of Meunasah Baro Village, as an immigration-assisted village. Data were collected through document studies and interviews, then analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the Lhokseumawe Immigration Office has taken preventive actions based on immigration functions, such as technical guidance for interview applicants, coordination with related agencies, media outreach, and establishing immigration-assisted villages. However, the number of non-procedural PMIs remains difficult to suppress due to internal and external barriers such as high workload, wide working area, low public awareness, and increasingly sophisticated illegal recruitment methods.

It is recommended that the Lhokseumawe Immigration Office enhance innovation in preventing non-procedural migrant workers, ensure fair task distribution, and strengthen coordination with relevant institutions, especially BP2MI as the authority responsible for migrant protection. The office should also improve immigration services and supervision, increase outreach activities, and reinforce the role of partner villages to ensure effective prevention efforts.

**Keywords: Immigration Role, Prevention, Indonesian Migrant Workers, Non-
-Procedural**